JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
Vol. 7 No. 1, 2024, hal 124-133 ISSN 2746-3249

Analisis Prioritas Anggaran Program pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Sukma Rani Safitri*, Muhammad Anshar Nur
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
*1910311120001@mhs.ulm.ac.id

Abstract
This research was (1) find out the criteria that determine priority budget programs Banjarmasin City Education Office, (2) find out alternative program options Banjarmasin City Education Office, (3) find out priority budget program preferences Banjarmasin City Education Office. The respondents, 9 respondents were influential in determining priority programs on budget for the Banjarmasin City Education Office using the AHP method. The results of this study indicate that alternatives criteria from HR availability, targeting, availability of funds, and benefits on the choice of priority budget programs Banjarmasin City Education Office with a preference of availability of funds 47%, benefits 28%, HR availability of 16%, and targeting 9%. Based on these alternative criteria, choices were obtained with the priority order of programs education management 44%, teaching staff and education 29%, curriculum development 18%, and education licensing control 9%. that the most prioritized is the education management program by 44%.
Keywords*: Priority; Budget; Program; Education; AHP Method.*

Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk (1) mengetahui kriteria yang menentukan prioritas anggaran program pada Dinas pendidikan Kota Banjarmasin, (2) mengetahui alternatif pilihan program pada Dinas pendidikan Kota Banjarmasin, (3) mengetahui preferensi prioritas anggaran program pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Responden penelitian adalah 9 responden yang berpengaruh dalam menentukan prioritas anggaran program Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan menggunakan Metode AHP. Hasil penelitian ini menunjukkan kriteria alternatif dari ketersediaan sumber daya manusia, pencapaian sasaran, ketersediaan dana, dan manfaat berpengaruh dalam penentuan prioritas anggaran program pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan urutan preferensi ketersediaan dana 47%, manfaat 28%, ketersediaan sumber daya manusia 16%, dan pencapaian sasaran 9%. Berdasarkan kriteria alternatif tersebut diperoleh alternatif pilihan dengan urutan preferensi program pengelolaan pendidikan 44%, program tenaga pendidik dan kependidikan 29%, program pengembangan kurikulum 18%, dan program pengendalian perizinan pendidikan 9%. Dapat disimpulkan bahwa yang paling diprioritaskan adalah program pengelolaan pendidikan sebesar 44%.
Kata Kunci : Prioritas; Anggaran; Program; Pendidikan; Metode AHP.

PENDAHULUAN

Pendidikan berperan penting dalam merangkul kemampuan masyarakat untuk mengembangkan teknologi modern sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuannya untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (Riani, 2004). Kualitas sumber daya manusia sangat bergantung pada kualitas pendidikan, artinya semakin tinggi pendidikan yang telah diselesaikan maka kualitas sumber daya manusia akan semakin baik.

Tabel 1 Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banjarmasin, 2015-2021

No	RRLS dan APS	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2020	2021
1	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,9	9,91	9,92	9,93	9,95	10,2

No	RRLS dan APS	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2020	2021
2	Angka Partisipasi Sekolah SD (%)	99,55	99,68	100	100	99,67	99,38
3	Angka Partisipasi Sekolah SLTP (%)	97,04	91,08	92,19	91,91	93,56	93,36

Sumber : (BPS Kota Banjarmasin,2022)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Banjarmasin pada tahun 2021 telah menempuh pendidikan selama 10,2 tahun atau kelas X (satu SLTA). Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sudah bagus karena wewenang Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yaitu dari pendidikan PAUD sampai dengan pendidikan SMP.

Menurut kepala bidang pembinaan SD/Mi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, permasalahan pendidikan di Kota Banjarmasin dilihat dari penilaian angka partisipasi sekolah. Berdasarkan tabel 1, angka partisipasi sekolah Kota Banjarmasin pada tahun 2017, dan 2018 jenjang SD telah mencapai 100%, namun menurun pada tahun 2021 yaitu 99,38%. Pada jenjang SLTP angka partisipasi sekolah tahun 2021 mencapai 93,36%. Belum tercapainya angka partisipasi sekolah sesuai target 100% merupakan sebuah hambatan untuk Dinas Pendidikan. Masih banyak anak-anak umur sekolah yang belum dapat terlayani pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan untuk kemajuan negara memerlukan biaya yang setara dengan penyediaan suatu tingkat pelayanan pembiayaan (Nandani et al., 2018). Pengalokasian anggaran yang tepat dapat menghasilkan pencapaian yang optimal. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan mutu kinerja instansi pemerintah agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tercapainya keselarasan antara visi dan misi pemerintah daerah tentunya harus berkoordinasi dengan instansi-instansi dan dalam anggaran tidak terjadi kebocoran pengeluaran (Erdira & Nur, 2022).

Anggaran pendidikan termasuk besar, sehingga pengelolaan anggaran yang besar harus diperhatikan agar tidak terjadi penyelewengan dan bermanfaat bagi masyarakat (Rakhmatullah & Syafruddin, 2020). Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah membuat empat program dalam mengatasi permasalahan pendidikan tersebut. Program tersebut dibuat untuk mencapai sasaran yaitu meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan dengan indikator sasarannya adalah indeks pendidikan, dan meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dengan indikator sasarannya adalah angka partisipasi sekolah (APS). Berikut ini adalah program beserta nilai pagu masing-masing program.

Tabel 2 Nilai Pagu Anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, 2022

No.	Program	Nilai Pagu (Rp)	Persentase (%)
1.	Pengelolaan Pendidikan	58.475.281.766	97,37 %
2.	Pengembangan Kurikulum	1.202.480.000	2 %
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	134.107.000	0,23 %
4.	Pengendalian Perizinan Pendidikan	240.000.000	0,40 %
	Total	**60.051.868.766**	**100 %**

Sumber : (Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin,2022)

Total anggaran seluruh program Dinas Pendidikan yang akan digunakan yaitu Rp 60.051.868.766. Program pengelolaan pendidikan dengan persentase 97,37%. Program pengembangan kurikulum dengan nilai pagu Rp 1.202.480.000 dengan persentase 2%. Program pendidik dan tenaga kependidikan dengan nilai pagu Rp. 134.107.000 dengan persentase 0,23%. Dan program pengendalian dan perizinan pendidikan dengan nilai pagu Rp. 240.000.000 presentase 0,4%.

Inti permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana preferensi kriteria, apa saja alternatif pilihan dan bagaimana preferensi prioritas dalam menentukan prioritas anggaran program pada Dinas pendidikan Kota Banjarmasin?.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria, alternatif, dan preferensi penentuan prioritas anggaran program pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KAJIAN PUSTAKA

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang sangat penting, Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan, karena berkaitan dengan tujuan pemerintah itu sendiri dalam hal kesejahteraan rakyatnya (Erdira & Nur, 2022).

Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut (Ernita, 2022). Pengalokasian anggaran masing-masing kegiatan disesuaikan dengan pencapaian fungsi dan sasaran. Proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas daerah (Nurkholis & Khusaini, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (2004) tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program. Program merupakan instrumen kebijakan dengan beberapa kegiatan untuk mencapai sasaran dengan adanya pengalokasian anggaran. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan satu atau beberapa satuan kerja. Anggaran adalah dana yang disediakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Sasaran, program, kegiatan, dan anggaran memiliki hubungan yang begitu erat karena apabila satu saja yang tidak ada maka struktur perencanaan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 (2006), kebijakan adalah tindakan pemerintah (pusat/daerah) untuk mencapai tujuan.

Negara berkewajiban membiayai pendidikan setiap warganya dengan anggaran pendidikan 20% dari APBD. Setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya (Nandani et al., 2018). Peran negara penting untuk memajukan pendidikan di masyarakat dengan dukungan kesadaran individu masyarakatnya (Noor & Zulfaridatulyaqin, 2019). Indeks pendidikan merupakan salah satu indikator dari IPM.

Sesuai dengan target pada SDGs tujuan 04 yaitu tentang pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mengurangi disparitas sekolah. Negara menjamin setiap warga memiliki akses pendidikan yang berkualitas, sehingga berbagai latar belakang ekonomi dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas (Irhamsyah, 2019).

Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. AHP sering digunakan untuk mengintegrasikan preferensi subjektif ke dalam proses evaluasi. AHP digunakan oleh para peneliti karena kesederhanaan, keserbagunaan, dan akurasinya yang lebih baik (Susanto & Puspaningrum, 2020).

Penelitian dari Susanto dan Puspaningrum (2020) berjudul "Model Prioritas Program Pemerataan IPM di Provinsi Lampung Menggunakan *Metode Analytic Hierarchy Process"* menunjukkan bahwa prioritas pembangunan IPM secara berturut yaitu RLS, HLS, PPK dan AHH. Penelitian dari Ernita (2022) yang berjudul "Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pembangunan Manusia di Kabupaten Kerinci" menunjukkan bahwa belanja pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kerinci, belanja kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia. Penelitian dari Nandani et al. (2018) yang berjudul "Analisis Alokasi Anggaran Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah" menunjukkan bahwa anggaran pendidikan Kabupaten Ponorogo lebih dari 20% yaitu rata-rata sebesar 51,24%. Hasil proporsi belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung.

METODE

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada prioritas anggaran program pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan menggunakan metode AHP. Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif dengan jenis data ordinal, Sumber datanya adalah data primer.

Responden

Peneliti menggunakan *Non-Probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* menggunakan kriteria yang sudah dipilih oleh peneliti dalam pemilihan sampel (Sugiyono, 2013). Sembilan responden dipilih dengan didasari penggunaan metode saaty adalah 5 responden dari Dinas Pendidikan, 1 responden dari DPRD, 1 responden dari BPKPAD, 1 responden dari Bappeda Litbang, dan 1 responden pengamat pendidikan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan 4 (empat) cara yaitu (1) observasi dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian, (2) wawancara dengan pengumpulan data dengan dialog secara langsung kepada responden, (3) kuesioner dengan pengumpulan data memberikan pertanyaan tertulis dengan panduan kuesioner.(4) Studi kepustakaan sebagai sumber pelengkap penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis perhitungan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang merupakan metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty (Munthafa & Mubarok, 2018).

HASIL DAN ANALISIS

Karakteristik Responden

Berikut ini merupakan uraian sembilan responden, yaitu : (1) Ibu Eka Hidayati, Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang turut dalam memberikan penilaian dan informasi terkait kondisi anggaran program pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. (2) Bapak Isnooreedy, Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang turut dalam memberikan penilaian dan informasi terkait kondisi anggaran program pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. (3) Ibu Rahmasari, Kabid PTK Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang turut dalam memberikan penilaian dan informasi terkait kondisi anggaran program pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. (4) Bapak Edy Junaidi, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang turut dalam memberikan penilaian dan informasi terkait kondisi anggaran program pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. (5) Bapak Saipuddin Zuhri, Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang turut dalam memberikan penilaian dan informasi terkait kondisi anggaran program pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. (6) Ibu Maya Tanjung Putri, Kabid P2EPD Bappeda Litbang Kota Banjarmasin merupakan perwakilan dari Bappeda Litbang juga turut memberikan penilaian. (7) Bapak Muhammad Ikhsan Lutfi, Bidang Anggaran BPKPAD Kota Banjarmasin merupakan perwakilan dari BPKPAD yang ahli dalam anggaran turut memberikan penilaian. (8) Bapak Hendra, Anggota DPRD Kota Banjarmasin pada Badan Anggaran Kota Banjarmasin merupakan perwakilan dari DPRD yang ahli dalam penganggaran turut memberikan penilaian dan usul (9) Bapak Moh Yamin merupakan tokoh masyarakat yang mengamati Pendidikan turut membantu dalam memberi penilaian.

Analisis Prioritas Anggaran Program pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Rata-Rata Geometrik Kriteria

Tabel 3 Penilaian/Preferensi Kriteria dan Rata-Rata Geometrik Kriteria

Responden	Ketersediaan SDM	Pencapaian Sasaran	Ketersediaan Dana	Manfaat
Responden 1	6	7	9	8
Responden 2	7	6	8	5
Responden 3	6	7	9	8

Responden	Ketersediaan SDM	Pencapaian Sasaran	Ketersediaan Dana	Manfaat
Responden 4	6	5	9	8
Responden 5	7	6	8	9
Responden 6	6	5	9	7
Responden 7	5	4	9	8
Responden 8	7	6	5	6
Responden 9	5	4	9	7
Total	11113200	4233600	170061120	54190080
GM	6,1	5,4	8,2	7,2
Pembulatan	6	5	8	7

Sumber : Hasil Olah Data

Rata-rata geometrik kriteria tertinggi yaitu ketersediaan dana 8,2 dibulatkan menjadi 8, manfaat 7,2 dibulatkan menjadi 7, ketersediaan SDM 6,1 dibulatkan menjadi 6, dan pencapaian sasaran 5,4 dibulatkan menjadi 5. Rata-rata responden memberikan penilaian tinggi terhadap ketersediaan dana karena menganggap ketersediaan dana sangat penting dalam prioritas pembangunan bidang pendidikan.

Rata-Rata Geometrik untuk Alternatif

Tabel 4 Penilaian/Preferensi Alternatif Pilihan Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Rata-Rata Geometrik

Kriteria Ketersediaan Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
Responden 1	9	7	8	6
Responden 2	7	5	8	6
Responden 3	8	6	7	5
Responden 4	8	7	9	6
Responden 5	7	8	6	5
Responden 6	6	7	9	5
Responden 7	7	4	9	3
Responden 8	8	4	7	3
Responden 9	7	6	9	5
Total	66382848	7902720	123451776	1215000
GM	7,4	5,8	7,9	4,7
Pembulatan	7	6	8	5

Sumber : Hasil Olah Data

Responden memberikan penilaian tertinggi terhadap program pendidik dan tenaga kependidikan 7,9 dibulatkan menjadi 8, program pengelolaan pendidikan 7,4 dibulatkan menjadi 7, program pengembangan kurikulum 5,9 dibulatkan menjadi 6, program pengendalian perizinan pendidikan 4,7 dibulatkan menjadi 5. Responden menganggap bahwa program pendidik dan tenaga kependidikan memerlukan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas karena kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan banyak, namun belum bersertifikasi.

Tabel 5 Penilaian/Preferensi Alternatif Pilihan Pencapaian Sasaran dan Rata-Rata Geometrik

Kriteria Pencapaian Sasaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
Responden 1	8	7	6	5
Responden 2	7	8	6	5
Responden 3	9	7	8	6
Responden 4	9	8	7	6
Responden 5	9	8	7	5
Responden 6	9	6	7	5
Responden 7	8	3	6	2
Responden 8	5	6	8	3
Responden 9	8	6	9	4
Total	117573120	16257024	42674688	540000
GM	7,9	6,3	7,0	4,3
Pembulatan	8	6	7	4

Sumber : Hasil Olah Data

Responden memberikan penilaian tertinggi terhadap program pengelolaan pendidikan 7,9 dibulatkan menjadi 8, program pendidik dan tenaga kependidikan 7,0 dibulatkan menjadi 7, program pengembangan kurikulum 6,3 dibulatkan menjadi 6, program pengendalian perizinan pendidikan 4,3 dibulatkan menjadi 4. Responden menganggap bahwa program pengelolaan pendidikan merupakan program paling penting dalam pencapaian sasaran karena berdasarkan sasaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yaitu peningkatan mutu pendidikan dengan indikator sasaran indeks pendidikan, dan peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dengan indikator sasaran angka partisipasi sekolah (APS).

Tabel 6 Penilaian/Preferensi Alternatif Pilihan Ketersediaan Dana dan Rata-Rata Geometrik

Kriteria Ketersediaan Dana	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
Responden 1	9	7	8	6
Responden 2	9	8	7	6
Responden 3	9	8	7	6
Responden 4	8	7	9	6
Responden 5	9	8	7	6
Responden 6	9	7	8	6
Responden 7	8	6	7	5
Responden 8	8	3	7	5
Responden 9	9	7	8	6
Total	272097792	22127616	77446656	6998400
GM	8,7	6,5	7,5	5,8
Pembulatan	9	7	8	6

Sumber : Hasil Olah Data

Responden memberikan penilaian tertinggi terhadap program pengelolaan pendidikan 8,7 dibulatkan menjadi 9, program pendidik dan tenaga kependidikan 7,5 dibulatkan menjadi 8, program pengembangan kurikulum 6,5 dibulatkan menjadi 7, program pengendalian perizinan pendidikan 5,8 dibulatkan menjadi 6. Responden menganggap bahwa program pengelolaan pendidikan merupakan program paling penting dalam kriteria ketersediaan dana karena semua kegiatan didalamnya memerlukan dana yang lebih besar dari program lainnya.

Tabel 7 Penilaian/Preferensi Alternatif Pilihan Manfaat dan Rata-Rata Geometrik

Kriteria Manfaat	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
Responden 1	9	8	6	5
Responden 2	7	8	6	5
Responden 3	9	7	8	6
Responden 4	8	7	6	5
Responden 5	9	8	7	5
Responden 6	8	7	6	4
Responden 7	9	7	3	5
Responden 8	6	3	7	5
Responden 9	7	8	6	4
Total	123451776	29503488	9144576	1500000
GM	7,9	6,8	5,9	4,9
Pembulatan	8	7	6	5

Sumber : Hasil Olah Data

Responden memberikan penilaian tertinggi terhadap program pengelolaan pendidikan 7,9 dibulatkan menjadi 8, program pengembangan kurikulum 6,8 dibulatkan menjadi 7, program pendidik dan tenaga kependidikan 5,9 dibulatkan menjadi 6, program pengendalian perizinan pendidikan 4,9 dibulatkan menjadi 5. Responden menganggap bahwa program pengelolaan pendidikan merupakan program paling penting karena dengan sarana dan prasarana sekolah yang bagus akan membuat warga sekolah merasa nyaman untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar sehingga hal tersebut memberikan manfaat terhadap masyarakat.

Perbandingan Berpasangan

Tabel 8 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria

KRITERIA	Ketersediaan Sumber Daya Manusia	Pencapaian Sasaran	Ketersediaan Dana	Manfaat
Ketersediaan Sumber Daya Manusia	1	2	1/3	½
Pencapaian Sasaran	½	1	¼	1/3
Ketersediaan Dana	3	4	1	2
Manfaat	2	3	½	1
JUMLAH	**6,5**	**10**	**2,08**	**3,83**

Sumber : Hasil Olah Data

Perbandingan pasangan kriteria ketersediaan SDM dan ketersediaan dana adalah 1/3 menunjukkan bahwa kriteria ketersediaan dana sedikit lebih penting dari kriteria ketersediaan SDM. Ketersediaan SDM dan manfaat 1/2, artinya manfaat memiliki nilai sedikit lebih penting dari ketersediaan SDM. Perbandingan pencapaian sasaran dan ketersediaan SDM 1/2 artinya ketersediaan SDM sedikit lebih penting dari pencapaian program. Perbandingan pencapaian sasaran dan ketersediaan dana 1/4, artinya ketersediaan dana sedikit lebih penting dari pencapaian sasaran. Perbandingan pencapaian sasaran dan manfaat 1/3 artinya manfaat sedikit lebih penting dari pencapaian sasaran. Perbandingan manfaat dan ketersediaan dana bernilai 1/2, artinya ketersediaan dana bernilai sedikit lebih penting dari manfaat.

Penentuan Prioritas

Tabel 9 Prioritas Vektor Kriteria

KRITERIA	Ketersediaan Sumber Daya Manusia	Pencapaian Sasaran	Ketersediaan Dana	Manfaat	Jumlah baris	Rata-Rata
Ketersediaan Sumber Daya Manusia	2/13	2/10	4/25	3/23	0,64	0,16
Pencapaian Sasaran	1/13	1/10	3/25	2/23	0,38	0,09
Ketersediaan Dana	6/13	4/10	12/25	12/23	1,86	0,47
Manfaat	4/13	3/10	6/25	6/23	1,11	0,28
Jumlah						1,00

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan kriteria, persentase prioritas atau preferensi untuk ketersediaan SDM 0,16 atau 16%, pencapaian sasaran 0,09 atau 9%, ketersediaan dana 0,47 atau 47%, dan manfaat 0,28 atau 28%. Untuk kriteria, preferensi ketersediaan dana lebih tinggi dibandingkan manfaat, ketersediaan sumber daya manusia, dan pencapaian sasaran.

Rasio Konsistensi

Tabel 10 Matriks Rasio Konsistensi Kriteria

KRITERIA	Ketersediaan Sumber Daya Manusia	Pencapaian Sasaran	Ketersediaan Dana	Manfaat	jumlah baris
Ketersediaan Sumber Daya Manusia	0,16	0,18	0,16	0,14	0,64
Pencapaian Sasaran	0,08	0,09	0,12	0,09	0,38
Ketersediaan Dana	0,48	0,36	0,47	0,56	1,87
Manfaat	0,32	0,27	0,24	0,28	1,11

Sumber : Hasil Olah Data

$$\begin{Bmatrix} 0,64 \\ 0,38 \\ 1,87 \\ 1,11 \end{Bmatrix} : \begin{Bmatrix} 0,16 \\ 0,09 \\ 0,47 \\ 0,28 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4 \\ 4,22 \\ 3,98 \\ 3,96 \end{Bmatrix}$$

$$\lambda\text{Maks} = \frac{4+4,22+3,98+3,96}{4} = \frac{16,16}{4} = 4,04$$

$$\text{CI} = \frac{\lambda\text{Maks}}{n-1} = \frac{4,04-4}{4-1} = \frac{0,04}{3} = 0,\ 013$$

$$\text{CR} = \frac{\text{CI}}{\text{RI}} = \frac{0,013}{0,90} = 0,014$$

Hasil dari *Consistency Ratio* (CR) sebesar 0,014 atau 1,4% artinya penilaian yang diberikan oleh responden dinyatakan konsisten, benar dan layak untuk diterima, karena nilai 0,014 kurang dari 0,1 atau 1,4% kurang dari 10% (saaty).

Perangkingan Alternatif

Tabel 11 Perangkingan Alternatif (Hasil Penjumlahan dari Perkalian Setiap Bobot Alternatif dengan Bobot Kriteria)

	Ketersediaan SDM	Pencapaian Sasaran	Ketersediaan Dana	Manfaat		Bobot Kriteria		Vektor Prioritas
Program Pengelolaan Pendidikan	0,28	0,47	0,47	0,47		0,16		0,44
Program Pengembangan Krikulum	0,16	0,17	0,16	0,25		0,09		0,18
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,47	0,29	0,28	0,19	X	0,47	=	0,29
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	0,09	0,07	0,09	0,09		0,28		0,09

Sumber : Hasil Olah Data

Prioritas keputusan yang diambil adalah Program Pengelolaan Pendidikan (preferensi 0,44 atau 44%), Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (preferensi 0,29 atau 29%), Program Pengembangan Kurikulum (preferensi 0,18 atau 18%), Program Pengendalian Perizinan Pendidikan (preferensi 0,09 atau 9%). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa prioritas anggaran program pada Dinas Pendidikan yang di prioritaskan adalah Program Pengelolaan Pendidikan, diikuti Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, diikuti Program Pengembangan Kurikulum, diikuti Program Pengendalian Perizinan Pendidikan. Anggaran sebesar Rp. 60.051.868.766 dialokasikan untuk prioritas program pengelolaan pendidikan sebesar 44%, selanjutnya program pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 29%, program pengembangan kurikulum sebesar 18%, dan program pengendalian perizinan pendidikan sebesar 9%. Program yang diprioritaskan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sesuai dengan hasil penelitian namun kenyataannya berbeda karena dari Dinas Pendidikan memprioritaskan anggaran sebesar 97,37% untuk program pengelolaan pendidikan namun kenyataanya anggaran untuk program pengelolaan pendidikan hanya sebesar 44% dari anggaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi kriteria dalam prioritas anggaran program Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin adalah ketersediaan dana (0,47 atau 47%), manfaat (0,28 atau 28%), ketersediaan SDM (0,16 atau 16%), dan pencapaian sasaran (0,09 atau 9%). (2) Terdapat empat alternatif pilihan program yaitu program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, program pendidik dan tenaga kependidikan, dan program pengendalian perizinan pendidikan. (3) Prioritas keputusan yang diambil yaitu program pengelolaan pendidikan (0,44 atau 44%), program tenaga pendidik dan kependidikan (0,29 atau 29%), program pengembangan kurikulum (0,18 atau 18%), dan program pengendalian perizinan pendidikan (0,09 atau 9%). Berdasarkan keempat kriteria yaitu ketersediaan SDM, pencapaian sasaran, ketersediaan dana, dan manfaat yang dijadikan prioritas adalah program pengelolaan pendidikan dengan nilai prioritas tertinggi yaitu (0,44 atau 44%).

Saran

Saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : (1) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan kriteria lain. Disarankan untuk menggunakan sub-kriteria. (2) Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan diharapkan agar dapat menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dalam menentukan prioritas anggaran, karena dengan metode ini lebih mudah dalam penentuan prioritas sehingga realisasi anggaran dapat lebih efektif.

BIBLIOGRAPHY

Badan Pusat Statistika Kota Banjarmasin, (2022). Diambil Kembali dari statistik Kota Banjarmasin : https://banjarmasinkota.bps.go.id/. Diakses pada Tanggal 19 Oktober 2022.

Erdira, M. N., & Nur, M. A. (2022). *Analisis Alokasi Anggaran Kegiatan Pembangunan Bidang Drainase pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin*. Skripsi. Banjarmasin : Universitas Lambung Mangkurat.

Ernita, D. (2022). Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal AKRAB JUARA*, *7*(2), 258–270. https://doi.org/10.58487/akrabjurnal.v7i2.1849

Indonesia, P. P. R. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. In *Peraturan.Bpk.Go.Id*.

Irhamsyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, *38*, 45–54. https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.71

Munthafa, A. E., & Mubarok, H. (2018). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi. *Jurnal Siliwangi*, *3*(2), 192–201.

Nandani, S. C. D., Setyadin, B., & Nurabadi, A. (2018). Analisis Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, *1*(1), 22–28. https://doi.org/10.17977/um027v1i12018p22

Noor, M. A., & Zulfaridatulyaqin, S. M. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, *2*(4), 1028–1038. https://doi.org/10.20527/jiep.v2i4.1238

Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang : UB Press. https://play.google.com/books/reader?id=tcqPDwAAQBAJ&pg=GBS.PR3&hl=id

Rakhmatullah, & Syafruddin, R. (2020). Analisis Prioritas Belanja Desa Pada Dana Desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar. *JIEP :Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, *3*(1), 114–128. https://doi.org/10.20527/jiep.v3i1.2212

Riani, W. (2004). Pembangunan Pendidikan sebagai Motor Penggerak IPM Jawa Barat. *Mimbar : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, *XXII*(3), 278–291.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &Dd*. Bandung : ALFABETA. https://anyflip.com/utlqr/qtha/basic

Susanto, E. R., & Puspaningrum, A. S. (2020). Model Prioritas Program Pemerataan IPM Di Provinsi Lampung Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process. *Jurnal Teknoinfo*, *14*(1), 9. https://doi.org/10.33365/jti.v14i1.543

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. (2004). UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. In *Peraturan.Bpk.Go.Id* (pp. 1–32). http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf